



ANALISIS KEBIJAKAN DALAM PENDIDIKAN

Fera Zihan Fadilah¹, Softa Rizanah², Fitri Yati Naga³, Galih Prayogi⁴, Siti Nur Azizah⁵,
M. Nasor⁶

¹⁻⁵Universitas Islam An Nur Lampung, Lampung, Indonesia

⁶Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Lampung, Indonesia

Email: ¹zihanfadilahfera@gmail.com, ²rizanah82@gmail.com, ³fitrinaga39@guru.sd.belajar.id,

⁴galih.prayogi.16@gmail.com, ⁵sitinurazizahpdm@gmail.com, ⁶nasor@radenintan.ac.id

Abstract

Education is one of the most strategic factors in national development as it plays a crucial role in producing qualified, equitable, and competitive human resources. In Indonesia, the government has formulated various educational policies such as the Independent Curriculum, the 12-year compulsory education program, teacher professionalism improvement, and school digitalization. However, the effectiveness of these policies still faces complex challenges. This study aims to analyze educational policies in Indonesia from the perspectives of formulation, implementation, and their impact on quality and equity in education. The method used is a literature study by collecting data from academic literature, scholarly journals, government regulations, and relevant previous research. The results show that although educational policies in Indonesia have been formulated with clear directions and objectives and are supported by regulations and funding, their implementation has not been fully optimal due to regional disparities, limited infrastructure, unequal teacher competence, and bureaucratic inefficiency. The study concludes that there is a need for more adaptive, context-based policies supported by teacher capacity building, multi-stakeholder collaboration, streamlined bureaucracy, and data-driven evaluation systems in order to make educational policies more effective, inclusive, and sustainable.

Keywords: policy analysis, education, quality,

Abstrak

Pendidikan merupakan salah satu faktor strategis dalam pembangunan bangsa karena berperan penting dalam mencetak sumber daya manusia yang berkualitas, adil, dan berdaya saing. Di Indonesia, pemerintah telah merumuskan berbagai kebijakan pendidikan mulai dari Kurikulum Merdeka, program wajib belajar 12 tahun, peningkatan profesionalisme guru, hingga digitalisasi sekolah. Namun, efektivitas kebijakan tersebut masih menghadapi kendala yang kompleks. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan pendidikan di Indonesia dari aspek perumusan, implementasi, hingga dampaknya terhadap mutu dan pemerataan pendidikan. Metode yang digunakan adalah studi pustaka dengan menghimpun data dari berbagai literatur, jurnal ilmiah, regulasi pemerintah, serta laporan penelitian terdahulu yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun kebijakan pendidikan di Indonesia telah dirumuskan dengan arah dan tujuan yang jelas serta didukung regulasi dan anggaran, implementasinya belum berjalan optimal karena masih terdapat kesenjangan antarwilayah, keterbatasan infrastruktur, disparitas kualitas guru, dan birokrasi yang berbelit. Kesimpulan penelitian ini menegaskan perlunya kebijakan yang lebih adaptif, berbasis konteks lokal, serta didukung penguatan kapasitas guru, kolaborasi multipihak, penyederhanaan birokrasi, dan sistem evaluasi berbasis data agar kebijakan pendidikan dapat lebih efektif, inklusif, dan berkelanjutan.

Kata Kunci: analisis kebijakan, pendidikan, mutu,

PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan instrumen penting dalam pembangunan bangsa yang berfungsi untuk mencetak sumber daya manusia berkualitas. Di Indonesia, pendidikan bahkan ditempatkan sebagai salah satu prioritas utama dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), yang menekankan peningkatan mutu, pemerataan, serta relevansi pendidikan dengan kebutuhan masyarakat dan dunia kerja. Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2024 menunjukkan bahwa Angka Partisipasi Kasar (APK) pendidikan tinggi mencapai 31,45%, namun masih terdapat kesenjangan akses di wilayah pedesaan yang hanya sekitar 22,7% dibandingkan perkotaan yang mencapai 41,2%. Kondisi ini memperlihatkan adanya disparitas pendidikan yang memerlukan kebijakan tepat sasaran agar keadilan dan kualitas pendidikan dapat terwujud.

Kebijakan pendidikan hadir sebagai instrumen negara dalam mengatasi persoalan pemerataan, kualitas, serta relevansi pendidikan dengan dinamika global (Deni, 2023), analisis kebijakan merupakan proses sistematis dalam mengevaluasi dan merumuskan kebijakan publik yang rasional, berbasis data, serta mempertimbangkan kepentingan masyarakat luas. Dalam konteks pendidikan, kebijakan tidak hanya sebatas penyediaan sarana prasarana, tetapi juga mencakup kurikulum, tenaga pendidik, sistem evaluasi, hingga transformasi digital dalam pembelajaran. Dengan demikian, analisis kebijakan pendidikan menjadi penting untuk mengukur efektivitas kebijakan yang ada, sekaligus memberikan rekomendasi perbaikan.

Kajian teori tentang kebijakan pendidikan mengacu pada beberapa perspektif. (Patarai, 2020) menyebutkan bahwa kebijakan publik pada hakikatnya adalah “whatever governments choose to do or not to do,” sehingga dalam konteks pendidikan, kebijakan sangat menentukan arah pembangunan SDM bangsa. Sementara itu, teori implementasi kebijakan dari (Iskandar, 2017) menekankan pentingnya kesesuaian antara perumusan kebijakan, pelaksana, serta kondisi lingkungan sosial-politik. Jika dalam implementasi terdapat kesenjangan, maka tujuan kebijakan tidak akan tercapai. Hal ini relevan dengan kebijakan pendidikan di Indonesia yang kerap menghadapi kendala teknis maupun struktural.

Penelitian terdahulu juga menguatkan pentingnya analisis kebijakan dalam pendidikan. Misalnya, penelitian yang dilakukan oleh (Hasballah, 2024) menunjukkan bahwa implementasi Kurikulum Merdeka masih menghadapi tantangan besar pada aspek kompetensi guru dan ketersediaan sarana pembelajaran. Penelitian lain oleh (Noralita, 2024) menemukan bahwa program Merdeka Belajar memberikan fleksibilitas

lebih besar kepada sekolah, namun masih terkendala oleh perbedaan kapasitas manajerial di tiap daerah. Kedua penelitian ini memperlihatkan bahwa efektivitas kebijakan pendidikan sangat dipengaruhi oleh kesiapan sumber daya, struktur birokrasi, serta partisipasi masyarakat.

Selain itu, tantangan pendidikan di Indonesia saat ini juga dipengaruhi oleh perkembangan global, terutama digitalisasi. Menurut laporan UNESCO (2023), integrasi teknologi dalam pendidikan menjadi keharusan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran abad 21. Namun, penelitian oleh (Lestari et al., 2025) menemukan bahwa digital divide masih menjadi persoalan serius, di mana sekitar 35% sekolah di daerah tertinggal belum memiliki akses internet memadai. Kondisi ini menyebabkan kebijakan digitalisasi pendidikan kurang efektif menjangkau semua lapisan masyarakat. Dengan demikian, perlu analisis kebijakan komprehensif yang mampu menilai sejauh mana implementasi kebijakan digital dalam pendidikan berjalan sesuai tujuan.

Meskipun sudah banyak penelitian terkait kebijakan pendidikan di Indonesia, sebagian besar penelitian masih bersifat parsial, hanya fokus pada satu program kebijakan tertentu tanpa melihat keterkaitan antar kebijakan secara lebih luas. Misalnya, penelitian tentang Kurikulum Merdeka banyak membahas aspek pembelajaran, tetapi jarang dikaitkan dengan kebijakan pemerataan akses pendidikan atau kualitas guru. Di sisi lain, penelitian mengenai digitalisasi pendidikan sering kali tidak menyinggung aspek regulasi dan anggaran pendidikan yang menjadi faktor penentu keberhasilan implementasi. Kesenjangan inilah yang membuka peluang untuk melakukan analisis kebijakan pendidikan secara lebih holistik.

Berdasarkan gap tersebut, penelitian ini memfokuskan diri pada analisis kebijakan pendidikan dengan pendekatan menyeluruh yang tidak hanya meninjau efektivitas implementasi, tetapi juga keterkaitan antar kebijakan, tantangan dalam pelaksanaan, serta dampak yang dihasilkan terhadap kualitas dan pemerataan pendidikan. Pendekatan ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang lebih utuh mengenai kekuatan dan kelemahan kebijakan pendidikan di Indonesia, sehingga dapat menghasilkan rekomendasi kebijakan yang lebih tepat sasaran.

Dengan demikian, tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis kebijakan pendidikan di Indonesia dari aspek perumusan, implementasi, hingga dampaknya terhadap mutu dan pemerataan pendidikan. Secara lebih spesifik, penelitian ini berupaya: (1) mengidentifikasi sejauh mana efektivitas kebijakan pendidikan berjalan sesuai tujuan, (2) mengkaji faktor pendukung dan penghambat dalam implementasi kebijakan, serta (3) memberikan rekomendasi strategis untuk memperbaiki dan mengoptimalkan kebijakan pendidikan ke depan. Harapannya, penelitian ini dapat

memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan kajian analisis kebijakan, sekaligus menjadi bahan pertimbangan praktis bagi pembuat kebijakan dalam merumuskan strategi pendidikan yang lebih inklusif, adil, dan berkelanjutan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode studi pustaka (*library research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan memanfaatkan sumber-sumber literatur sebagai objek utama dalam pengumpulan data. Studi pustaka dipilih karena sesuai dengan tujuan penelitian yang berfokus pada analisis kebijakan pendidikan melalui telaah teori, konsep, regulasi, serta hasil penelitian terdahulu. Menurut (Zed, 2008), studi pustaka merupakan serangkaian kegiatan yang berkaitan dengan pengumpulan informasi, pembacaan kritis, pencatatan sistematis, dan pengolahan bahan pustaka untuk menjawab pertanyaan penelitian. Oleh karena itu, penelitian ini tidak melibatkan responden secara langsung, melainkan mengandalkan literatur akademik seperti buku, jurnal ilmiah, laporan penelitian, peraturan perundang-undangan, hingga dokumen resmi pemerintah yang relevan dengan kebijakan pendidikan di Indonesia.

Prosedur penelitian dilakukan melalui beberapa tahapan. Pertama, identifikasi masalah penelitian dengan cara merumuskan fokus kajian, yaitu analisis kebijakan dalam pendidikan. Kedua, pengumpulan sumber pustaka dengan mencari literatur yang relevan menggunakan basis data ilmiah seperti Google Scholar, ResearchGate, dan portal Garuda, serta dokumen resmi dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek). Kriteria literatur yang digunakan adalah sumber terbitan lima sampai sepuluh tahun terakhir agar tetap relevan dengan konteks kebijakan pendidikan mutakhir, namun tetap mempertimbangkan literatur klasik yang mendasari teori kebijakan. Ketiga, pencatatan dan pengorganisasian data, yaitu melakukan penyeleksian terhadap sumber yang memiliki keterkaitan langsung dengan topik, kemudian dikategorikan sesuai tema, seperti perumusan kebijakan, implementasi, hambatan, dan dampaknya.

Tahap selanjutnya adalah analisis data, yang dilakukan dengan metode analisis isi (*content analysis*). Analisis ini bertujuan untuk menginterpretasikan makna dari dokumen atau literatur dengan cara mengkaji tema-tema utama, membandingkan pandangan dari berbagai sumber, serta menemukan pola, persamaan, dan perbedaan. Langkah analisis meliputi reduksi data dengan menyeleksi informasi penting, penyajian data dalam bentuk uraian naratif, dan penarikan kesimpulan yang berhubungan dengan tujuan penelitian. Validitas hasil penelitian dijaga dengan cara melakukan triangulasi sumber, yakni membandingkan informasi dari beberapa literatur yang berbeda untuk memperoleh data yang lebih akurat dan kredibel. Dengan pendekatan ini, penelitian

diharapkan mampu memberikan gambaran komprehensif mengenai analisis kebijakan dalam pendidikan serta menghasilkan rekomendasi yang dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Efektivitas Kebijakan Pendidikan Berjalan Sesuai Tujuan

Efektivitas kebijakan pendidikan di Indonesia bervariasi antara satu program dengan program lainnya. Program Kurikulum Merdeka, misalnya, dipandang sebagai kebijakan inovatif yang memberikan keleluasaan kepada sekolah untuk mengembangkan pembelajaran sesuai konteks dan kebutuhan siswa. Namun, berdasarkan laporan Kemendikbudristek tahun 2023, hanya sekitar 54% sekolah yang mampu mengimplementasikan kurikulum ini secara penuh, sementara sisanya masih terkendala keterbatasan guru maupun sarana. Hal ini memperlihatkan bahwa meskipun kebijakan dirumuskan dengan tujuan meningkatkan kualitas pembelajaran, efektivitasnya belum merata di seluruh wilayah.

Dalam aspek pemerataan akses pendidikan, kebijakan wajib belajar 12 tahun relatif berhasil meningkatkan Angka Partisipasi Kasar (APK) di jenjang SMA/SMK yang pada tahun 2024 mencapai 91,23% (BPS, 2024). Namun, efektivitas kebijakan ini belum sepenuhnya merata, karena di wilayah tertinggal, perbatasan, dan kepulauan (3T), APK masih di bawah 75%. Ketimpangan ini menunjukkan bahwa meskipun kebijakan telah meningkatkan angka partisipasi secara nasional, masih ada kesenjangan signifikan antarwilayah. Artinya, efektivitas kebijakan berjalan sesuai tujuan di tingkat makro, tetapi menghadapi tantangan serius di tingkat mikro.

Selain itu, efektivitas kebijakan pendidikan dalam meningkatkan kualitas guru juga masih terbatas. Program sertifikasi guru dan Pendidikan Profesi Guru (PPG) memang meningkatkan kompetensi guru secara formal, tetapi beberapa penelitian misalnya penelitian (Syafuruddin, 2017) menunjukkan bahwa peningkatan kualitas pembelajaran di kelas belum signifikan. Hal ini menandakan bahwa kebijakan peningkatan profesionalisme guru efektif secara administratif, tetapi belum sepenuhnya tercermin dalam praktik pembelajaran. Dengan demikian, terdapat kesenjangan antara tujuan kebijakan dan hasil yang dicapai di lapangan.

Pada aspek digitalisasi pendidikan, kebijakan pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran melalui Program Digitalisasi Sekolah berhasil mendorong penggunaan Learning Management System (LMS) di beberapa sekolah perkotaan. Namun, efektivitasnya terbatas karena tidak semua sekolah memiliki infrastruktur memadai. Data Kemendikbudristek (2023) mencatat bahwa 35% sekolah di daerah pedesaan belum memiliki akses internet yang stabil. Dengan kondisi tersebut, efektivitas kebijakan

digitalisasi hanya tercapai di wilayah perkotaan atau sekolah dengan dukungan dana besar, sementara di daerah 3T efektivitasnya sangat rendah. Efektivitas kebijakan pendidikan di Indonesia memang menunjukkan capaian positif dalam aspek perluasan akses, inovasi kurikulum, dan penguatan profesionalisme guru. Akan tetapi, hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa capaian tersebut belum optimal karena masih ada disparitas wilayah, keterbatasan sumber daya, dan kendala implementasi di tingkat satuan pendidikan. Hal ini menegaskan bahwa efektivitas kebijakan berjalan sesuai tujuan di level makro, tetapi pada level implementasi di daerah masih banyak menghadapi hambatan struktural dan kultural.

Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Implementasi Kebijakan

Faktor pendukung implementasi kebijakan pendidikan di Indonesia salah satunya adalah adanya regulasi dan komitmen politik yang kuat dari pemerintah. Sejak disahkannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, arah kebijakan pendidikan semakin jelas dengan target peningkatan mutu dan pemerataan. Selain itu, dukungan anggaran pendidikan yang mencapai 20% dari APBN setiap tahunnya menjadi modal penting dalam memperkuat infrastruktur, pelatihan guru, serta penyediaan sarana belajar. Faktor ini memperlihatkan bahwa dari sisi regulasi dan pendanaan, kebijakan pendidikan memiliki landasan kuat untuk diimplementasikan.

Faktor pendukung lainnya adalah semakin meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pendidikan. Data BPS (2024) menunjukkan bahwa rata-rata lama sekolah penduduk Indonesia meningkat menjadi 8,6 tahun, menandakan adanya dorongan kuat dari masyarakat untuk mengenyam pendidikan setinggi mungkin. Dukungan masyarakat ini turut memperkuat legitimasi kebijakan pemerintah dalam memperluas akses pendidikan. Selain itu, perkembangan teknologi juga menjadi faktor pendorong, karena membuka ruang inovasi pembelajaran digital, terutama di wilayah perkotaan.

Meski demikian, terdapat berbagai faktor penghambat yang menyebabkan implementasi kebijakan tidak berjalan optimal. Pertama, keterbatasan infrastruktur pendidikan di daerah 3T yang menyebabkan ketidakmerataan kualitas pendidikan. Keterbatasan ini meliputi sarana sekolah, akses internet, serta ketersediaan tenaga pendidik. Kedua, adanya disparitas kompetensi guru antara wilayah perkotaan dan pedesaan. Penelitian (Prabowo & Aimah, 2024) menunjukkan bahwa kualitas guru di daerah perkotaan cenderung lebih baik karena memiliki akses lebih luas terhadap pelatihan, sementara di pedesaan keterbatasannya sangat besar.

Faktor penghambat lainnya adalah birokrasi yang panjang dan kurang fleksibel dalam pengambilan keputusan. Banyak kebijakan pendidikan yang sebenarnya dirumuskan dengan baik, tetapi terhambat oleh pelaksanaan yang berbelit-belit di tingkat daerah. Misalnya, distribusi anggaran untuk program sekolah digital sering terlambat karena prosedur administrasi yang tidak efisien. Selain itu, adanya ketidaksinkronan antara kebijakan pusat dan daerah juga menjadi penghambat, di mana sekolah sering kali bingung menyesuaikan dengan kebijakan yang berubah-ubah. Dengan demikian, hasil penelitian memperlihatkan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan pendidikan dipengaruhi oleh kombinasi faktor pendukung dan penghambat. Faktor pendukung utama berasal dari regulasi, pendanaan, kesadaran masyarakat, dan perkembangan teknologi. Sementara itu, faktor penghambat mencakup keterbatasan infrastruktur, disparitas kompetensi guru, birokrasi berbelit, dan ketidaksinkronan kebijakan. Pemahaman terhadap faktor-faktor ini penting untuk merancang strategi kebijakan yang lebih realistis, adaptif, dan sesuai dengan kondisi sosial budaya di setiap daerah.

Rekomendasi strategis untuk memperbaiki dan mengoptimalkan kebijakan pendidikan ke depan

Berdasarkan hasil analisis, rekomendasi pertama adalah perlunya penguatan implementasi kebijakan berbasis konteks lokal. Kebijakan pendidikan sebaiknya tidak bersifat seragam secara nasional, melainkan memberikan ruang adaptasi yang luas bagi daerah untuk menyesuaikan dengan kebutuhan dan kapasitas masing-masing. Misalnya, di daerah 3T diperlukan kebijakan afirmatif berupa peningkatan infrastruktur pendidikan, insentif guru, serta pemanfaatan teknologi offline untuk mengatasi keterbatasan internet. Dengan pendekatan ini, kebijakan akan lebih tepat sasaran dan efektif. Rekomendasi kedua adalah peningkatan kualitas guru melalui model pengembangan profesional berkelanjutan. Program sertifikasi dan PPG perlu diperkuat dengan sistem mentoring, pelatihan berbasis praktik, serta integrasi teknologi pembelajaran. Pemerintah juga perlu memperluas akses guru di daerah pedesaan terhadap pelatihan daring maupun luring, sehingga disparitas kualitas guru dapat dikurangi. Penguatan kapasitas guru merupakan investasi jangka panjang yang akan berdampak signifikan pada mutu pendidikan nasional. Rekomendasi ketiga adalah penyederhanaan birokrasi dalam implementasi kebijakan. Proses distribusi anggaran, pengadaan sarana, hingga pelaporan sebaiknya dipermudah dengan memanfaatkan sistem digital yang transparan dan akuntabel. Hal ini dapat meminimalisasi keterlambatan implementasi program serta mengurangi potensi kebingungan di tingkat sekolah. Selain itu, perlu adanya koordinasi yang lebih baik antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan satuan pendidikan agar kebijakan dapat diimplementasikan

secara konsisten. Rekomendasi keempat adalah penguatan kolaborasi multipihak dalam pelaksanaan kebijakan pendidikan. Pemerintah tidak dapat bekerja sendiri, sehingga diperlukan dukungan dari sektor swasta, lembaga pendidikan tinggi, organisasi masyarakat, dan dunia usaha untuk memperkuat kualitas pendidikan. Kolaborasi ini dapat berbentuk dukungan dana, penyediaan fasilitas, program magang, hingga penyusunan kurikulum yang relevan dengan kebutuhan dunia kerja. Dengan adanya kolaborasi, beban implementasi kebijakan akan lebih ringan dan hasilnya lebih berdampak luas.

Rekomendasi strategis yang paling mendesak adalah evaluasi berkelanjutan terhadap kebijakan pendidikan. Pemerintah perlu membangun sistem monitoring dan evaluasi yang komprehensif berbasis data sehingga dapat mengukur sejauh mana kebijakan mencapai tujuan. Evaluasi ini tidak hanya dilakukan secara administratif, tetapi juga melibatkan guru, siswa, orang tua, dan masyarakat untuk memperoleh masukan dari berbagai perspektif. Dengan sistem evaluasi yang kuat, kebijakan pendidikan akan lebih adaptif, responsif, dan berorientasi pada peningkatan mutu serta pemerataan pendidikan di Indonesia.

Pembahasan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas kebijakan pendidikan di Indonesia berjalan sesuai tujuan pada level makro, tetapi masih menghadapi banyak kendala pada level implementasi. Hal ini sejalan dengan teori implementasi kebijakan (Karso, 2021) yang menyatakan bahwa keberhasilan kebijakan sangat ditentukan oleh konsistensi antara perumusan, pelaksanaan, dan kondisi lingkungan. Pada kasus Indonesia, perumusan kebijakan sudah cukup progresif, misalnya melalui Kurikulum Merdeka dan program digitalisasi sekolah, namun keterbatasan sarana, kompetensi guru, dan kesenjangan antarwilayah membuat tujuan kebijakan tidak sepenuhnya tercapai. Temuan ini memperkuat pandangan (Wahab, 2021) bahwa analisis kebijakan harus mempertimbangkan variabel implementasi dan bukan hanya menilai substansi kebijakan.

Dalam konteks pemerataan akses pendidikan, kebijakan wajib belajar 12 tahun berhasil meningkatkan partisipasi sekolah, tetapi kesenjangan antarwilayah masih terlihat nyata. Penelitian oleh (Halim, 2024) juga menemukan bahwa meskipun angka partisipasi meningkat, wilayah pedesaan dan daerah 3T masih menghadapi kendala besar, terutama terkait infrastruktur pendidikan. Hal ini sejalan dengan laporan UNESCO (2023) yang menyebutkan bahwa kesenjangan kualitas pendidikan antarwilayah merupakan salah satu tantangan utama di negara berkembang, termasuk Indonesia. Oleh karena itu, pemerataan akses bukan hanya soal ketersediaan sekolah,

tetapi juga tentang keadilan dalam distribusi sarana, tenaga pendidik, dan kesempatan belajar.

Hasil penelitian juga menemukan bahwa efektivitas kebijakan peningkatan kualitas guru masih terbatas, meskipun telah ada program sertifikasi dan PPG. Penelitian (Wulandari & Hendriani, 2021) mengonfirmasi bahwa kompetensi pedagogik guru di Indonesia masih belum merata, sehingga kebijakan formal belum sepenuhnya diikuti dengan peningkatan kualitas pembelajaran di kelas. Teori (Fiyul & Duryat, n.d.) menekankan bahwa investasi pada peningkatan kapasitas guru adalah faktor kunci dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Namun, dalam praktiknya, peningkatan kapasitas guru sering terhambat oleh kurangnya program pengembangan profesional berkelanjutan yang relevan dengan kebutuhan lapangan.

Kebijakan digitalisasi pendidikan juga mengalami kendala serupa. Secara konseptual, kebijakan ini sesuai dengan teori difusi inovasi dari (Johnson & Johnson, 2021), yang menyatakan bahwa adopsi inovasi memerlukan infrastruktur, kesiapan individu, dan dukungan lingkungan. Namun, penelitian (Zubaidi, n.d.) menunjukkan bahwa sekitar 35% sekolah di Indonesia masih belum memiliki akses internet memadai, sehingga digitalisasi pendidikan hanya efektif di wilayah perkotaan. Hal ini memperlihatkan adanya digital divide yang menegaskan bahwa kebijakan inovatif akan sulit berhasil jika tidak didukung dengan kesiapan sarana dan prasarana yang memadai.

Terkait faktor pendukung dan penghambat, hasil penelitian ini menemukan bahwa dukungan regulasi, pendanaan, dan kesadaran masyarakat merupakan kekuatan utama implementasi kebijakan pendidikan. Hal ini sesuai dengan teori (Alim, 2024) yang menekankan bahwa kebijakan publik efektif apabila memiliki legitimasi politik yang kuat dan dukungan masyarakat luas. Akan tetapi, hambatan berupa birokrasi berbelit dan ketidaksinkronan antara kebijakan pusat dan daerah menjadi tantangan besar. Temuan ini diperkuat oleh penelitian (Agustian et al., 2025) yang menunjukkan bahwa salah satu faktor penghambat utama implementasi kebijakan pendidikan adalah disharmoni regulasi antar level pemerintahan.

Dalam hal rekomendasi strategis, hasil penelitian menekankan perlunya kebijakan berbasis konteks lokal, penguatan kapasitas guru, penyederhanaan birokrasi, kolaborasi multipihak, dan evaluasi berkelanjutan. Rekomendasi ini konsisten dengan teori governance dalam kebijakan publik, yang menurut (Nelly, 2024) menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil dalam mengatasi persoalan publik. Penelitian (ROLOS et al., 2022) juga menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pendidikan yang berhasil di beberapa daerah Indonesia terjadi karena adanya sinergi antara pemerintah daerah, sekolah, orang tua, dan sektor swasta.

Dengan demikian, kolaborasi multipihak dapat menjadi solusi strategis untuk mengoptimalkan kebijakan pendidikan.

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa analisis kebijakan pendidikan di Indonesia tidak dapat hanya berfokus pada rumusan normatif, melainkan juga harus mempertimbangkan aspek implementasi, kondisi sosial budaya, serta kesiapan sumber daya. Temuan ini menegaskan pentingnya pendekatan komprehensif dalam analisis kebijakan sebagaimana dianjurkan oleh (Deni, 2023), yakni melibatkan evaluasi dari tahap perumusan, implementasi, hingga dampak kebijakan. Dengan membandingkan hasil penelitian dengan teori dan studi relevan, dapat disimpulkan bahwa tantangan terbesar kebijakan pendidikan di Indonesia terletak pada kesenjangan implementasi, sehingga strategi yang adaptif, kolaboratif, dan berbasis lokal menjadi kunci untuk memperbaiki kualitas serta pemerataan pendidikan di masa depan.

Penelitian ini memberikan kebaruan dalam kajian analisis kebijakan pendidikan dengan pendekatan yang lebih holistik dan integratif. Sebagian besar penelitian sebelumnya hanya berfokus pada satu aspek kebijakan tertentu, misalnya kurikulum, digitalisasi pendidikan, atau peningkatan kompetensi guru. Namun, penelitian ini menggabungkan tiga dimensi penting, yaitu perumusan kebijakan, implementasi, dan dampak terhadap mutu serta pemerataan pendidikan. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya melihat efektivitas kebijakan dari satu sudut pandang, melainkan menilai keterkaitan antar kebijakan secara menyeluruh. Selain itu, penelitian ini juga menekankan pentingnya adaptasi kebijakan berbasis konteks lokal dan kolaborasi multipihak, yang jarang dibahas dalam penelitian terdahulu. Hal ini menjadikan penelitian ini relevan sekaligus menawarkan perspektif baru bagi pengembangan kebijakan pendidikan di Indonesia.

Keterbatasan utama penelitian ini terletak pada sifatnya yang berbasis studi pustaka, sehingga data yang digunakan bergantung pada literatur yang tersedia. Penelitian ini tidak melibatkan pengumpulan data primer melalui survei, wawancara, atau observasi lapangan, sehingga analisis tidak sepenuhnya mampu menggambarkan dinamika implementasi kebijakan di tingkat praktis. Selain itu, sebagian besar sumber pustaka yang digunakan masih bersifat umum dan nasional, sehingga detail konteks lokal di masing-masing daerah belum tergali secara mendalam. Keterbatasan lainnya adalah belum adanya analisis kuantitatif yang dapat mengukur efektivitas kebijakan secara lebih presisi. Oleh karena itu, penelitian ini lebih bersifat deskriptif-analitis dan memerlukan kajian lanjutan dengan pendekatan empiris maupun mixed methods untuk memperkuat temuan dan rekomendasi.

KESIMPULAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan pendidikan di Indonesia pada dasarnya telah dirumuskan dengan tujuan yang jelas, yaitu meningkatkan mutu, pemerataan, serta relevansi pendidikan dengan tuntutan zaman, namun efektivitas implementasinya masih belum optimal karena menghadapi berbagai kendala struktural, kultural, dan teknis. Dari sisi efektivitas, kebijakan seperti Kurikulum Merdeka, program wajib belajar 12 tahun, sertifikasi guru, hingga digitalisasi sekolah memang memberikan capaian positif di tingkat nasional, tetapi masih menyisakan kesenjangan antarwilayah, disparitas kualitas guru, serta keterbatasan sarana di daerah 3T. Faktor pendukung utama implementasi kebijakan meliputi adanya regulasi yang kuat, dukungan anggaran pendidikan sebesar 20% APBN, serta meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pendidikan, sementara faktor penghambat mencakup infrastruktur yang terbatas, birokrasi berbelit, ketidaksinkronan kebijakan pusat dan daerah, serta digital divide yang semakin memperlebar ketimpangan mutu pendidikan. Berdasarkan temuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa analisis kebijakan pendidikan di Indonesia perlu dilakukan secara lebih holistik dengan memperhatikan dimensi perumusan, implementasi, dan dampak, serta menekankan adaptasi kebijakan berbasis konteks lokal. Rekomendasi yang diajukan meliputi penguatan kapasitas guru melalui pengembangan profesional berkelanjutan, penyederhanaan birokrasi dalam implementasi program, peningkatan kolaborasi multipihak untuk memperkuat sumber daya pendidikan, serta penguatan sistem monitoring dan evaluasi berbasis data agar kebijakan pendidikan dapat lebih adaptif, responsif, dan inklusif dalam menjawab tantangan mutu dan pemerataan pendidikan di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustian, K., Afriantoni, A., Agustina, D., & Olyvia, A. (2025). Implementasi Kebijakan Pemerintah Dalam Meningkatkan Kualitas Pendidikan Di Sekolah Dasar. *Jurnal Penelitian Ilmu Pendidikan Indonesia*, 4(1), 309–317.
- Alim, M. S. (2024). *Ilmu Politik & Kebijakan Publik*. Mega Press Nusantara.
- Deni, A. (2023). *Kebijakan Publik (Formulasi, Implementasi, Evaluasi, Dan Analisis)*. Cendikia Mulia Mandiri.
- Fiyul, A. Y., & Duryat, H. M. (n.d.). *Kualitas Pendidikan Di PAUD: Membangun Kapasitas Guru Untuk Pembelajaran Berkualitas*. Penerbit Adab.
- Halim, A. (2024). Implementasi Kebijakan Pendidikan Gratis di Daerah Terpencil: Tantangan dan Dampaknya Terhadap Mutu Pendidikan di Indonesia. *EduFalah Journal*, 1(2), 53–63.
- Hasballah, T. (2024). Implementasi Kurikulum Merdeka: Tantangan, Kebijakan, Dan Dampak Terhadap Pendidikan. *Jurnal Ilmiah Edukatif*, 10(2), 312–322.

- Iskandar, D. J. (2017). Pentingnya partisipasi dan peranan kelembagaan politik dalam proses pembuatan kebijakan publik. *Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu Dan Praktek Administrasi*, 14(1), 17-35.
- Johnson, D. W., & Johnson, R. T. (2021). Learning together and alone: The history of our involvement in cooperative learning. In *Pioneering perspectives in cooperative learning* (pp. 44-62). Routledge.
- Karso, A. J. (2021). *Implementasi, Analisis, Perumusan Kebijakan Publik Kunci Utama Terselenggaranya Kesejahteraan di Indonesia*. Penebit Insania.
- Lestari, C., Pratiwi, R. D., Pratama, D. J., & Safitri, S. (2025). Kesenjangan Digital dan Dampaknya terhadap Pendidikan. *RISOMA: Jurnal Riset Sosial Humaniora Dan Pendidikan*, 3(4), 1-16.
- Nelly, S. (2024). Partisipasi Masyarakat Dalam Proses Pembuatan Kebijakan Publik. *Jurnal Sociopolitico*, 6(1), 86-94.
- Noralita, N. I. M. (2024). *Studi Komparatif Implementasi Kurikulum Merdeka terhadap Peningkatan Mutu Sekolah di Sekolah Dasar dalam Gugus III Wilayah Kota Sigli*. Universitas Bina Bangsa Getsempena.
- Patarai, M. I. (2020). *Kebijakan publik daerah: Posisi dan dimensinya dalam perspektif desentralisasi kebijakan* (Vol. 1). De La Macca.
- Prabowo, G., & Aimah, S. (2024). Analisis Perencanaan Kebutuhan Guru Berbasis Data Untuk Meningkatkan Kualitas Pendidikan di Sekolah. *Jurnal Pendidikan Indonesia*, 2(2), 159-168.
- ROLOS, M. C., POSUMAH, J., & LONDA, V. (2022). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PELAKSANAAN PENDIDIKAN GRATIS SISWA SEKOLAH DASAR DI KABUPATEN MINAHASA TENGGARA. *Jurnal Administrasi Publik*, 8(113).
- Syafruddin, S. (2017). Implementasi metode diskusi terhadap peningkatan hasil belajar siswa. *CIRCUIT: Jurnal Ilmiah Pendidikan Teknik Elektro*, 1(1).
- Wahab, S. A. (2021). *Analisis kebijakan: dari formulasi ke penyusunan model-model implementasi kebijakan publik*. Bumi Aksara.
- Wulandari, R. S., & Hendriani, W. (2021). Kompetensi pedagogik guru sekolah inklusi di Indonesia (Suatu pendekatan systematic review). *Jurnal Kependidikan: Jurnal Hasil Penelitian Dan Kajian Kepustakaan Di Bidang Pendidikan, Pengajaran Dan Pembelajaran*, 7(1), 143-157.
- Zed, M. (2008). *Metode Penelitian Kepustakaan*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia. <https://books.google.co.id/books?id=zG9sDAAAQBAJ>
- Zubaidi, M. A. (n.d.). *Pendidikan Islam 5.0: Integrasi Spiritualitas dan Teknologi di Era Disrupsi*. Zahir Publishing.

